

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor industri terutama industri manufaktur telah menggeser sektor pertanian dalam pembangunan. Sektor manufaktur yang modern, berbasis pada modal besar dan teknologi tinggi hidup berdampingan dengan sektor pertanian yang tradisional dan kurang produktif. Dualisme dalam sektor manufaktur juga terjadi antara industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang berdampingan dengan industri menengah dan besar (Mudrajat, 2007: 361). Industri tembakau yang banyak berdiri di Kabupaten Kudus menjadi salah satu sektor andalan sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibandingkan sektor lain. Industri tembakau atau rokok terus berkembang di Kabupaten Kudus hingga tumbuh industri besar rokok seperti PT. Djarum, PT. Interbacco Utama Industry dan PT. Nojorono Tobacco. Sehingga Kabupaten Kudus pun dikenal sebagai penghasil rokok terbesar di Jawa Tengah, selain Kabupaten Kediri di Jawa Timur.

Perkembangan industri tembakau atau rokok di Kabupaten Kudus ini jumlahnya semakin menurun. Industri rokok terus bersaing satu sama lain, tidak heran apabila industri rokok kecil banyak yang bangkrut karena tekanan dari sesamanya. Hal ini dikarenakan menurunnya daya saing industri dan menghadapi berbagai permasalahan baik faktor eksternal maupun internal, harga bahan baku yang semakin mahal membuat para pengusaha rokok kretek kecil kesulitan untuk

menekan biaya produksi. Bangkrutnya sejumlah industri rokok kecil ini menyebabkan pengurangan tenaga kerja sehingga pekerja buruh rokok pun menjadi pengangguran.

Menurunnya jumlah industri rokok ini ditanggapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Pemerintah daerah berusaha untuk mempertahankan eksistensi industri rokok sebagai sektor andalan di kabupaten. Otonomi daerah mempermudah pemerintah daerah untuk mengerti kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari pelaksanaan sampai dengan evaluasi (Huda, 2013: 81). Kemampuan daerah diperlukan bagi pengembangan daerah dan masyarakatnya, serta guna menjamin pemenuhan kepentingan nasional. Dengan kewenangan yang dimiliki, peran pemerintah daerah kini menjadi sama pentingnya dengan pemerintah pusat.

Salah satu pendapatan daerah yang diterima Kabupaten Kudus adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang salah satunya dapat digunakan untuk mendanai kelompok kegiatan. Kelompok kegiatan tersebut berupa program dengan skala nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena menerapkan otonomi daerah sesuai kebutuhan daerah. Adanya daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri dengan tetap dikontrol oleh pemerintah pusat dan undang-undang.

Pemerintah Daerah dituntut dapat berkreasi dalam menangani permasalahan di daerah masing-masing melalui berbagai kebijakan yang mendukung. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat bersaing dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam meningkatkan daya tarik daerahnya. Hal ini pun dikarenakan setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda. Pemerintah daerah di Kabupaten Kudus pun berhak untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat menggunakan dana DBHCHT tersebut. Termasuk dalam hal pembangunan yang terus berkembang, baik pada sektor perekonomian hingga industrinya.

Pembangunan merupakan proses menjadi lebih baik dan meningkat. Pembangunan nasional sendiri bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi, stabilitas ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja yang nantinya akan mewujudkan kondisi ekonomi yang berkesinambungan. Kabupaten Kudus adalah sebuah kabupaten dengan letak geografis yang sangat strategis karena berada di jalur perlintasan ekonomi antar provinsi sehingga menjadikan Kabupaten Kudus sebagai sentra perdagangan nasional yang memiliki mobilitas tinggi.

Sektor industri merupakan tiang penyangga utama dari perekonomian Kabupaten Kudus dengan kontribusi sebesar 81,09% terhadap PDRB Kabupaten Kudus. Sektor ini dibedakan dalam kelompok industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Dilihat dari jenis industrinya, perusahaan industri tembakau mendominasi dengan 34,25% dari jumlah usaha industri besar

dan sedang. Sehingga penyerapan tenaga kerja terbesar masih dari industri tembakau atau rokok yaitu sebesar 75,98%.¹

Tabel 1.1 Banyaknya Seluruh Perusahaan Industri dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kudus Tahun 2014 – 2015

Kecamatan	2014		2015	
	Perusahaan/ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perusahaan/ Unit Usaha	Tenaga Kerja
Kaliwungu	1.848	13.447	1.851	13.515
Kota	2.180	138.585	2.182	138.689
Jati	1.591	28.046	1.593	28.126
Undaan	477	2.046	478	2.054
Mejobo	1.822	4.652	1.825	4.688
Jekulo	1.076	5.574	1.078	5.607
Bae	1.283	30.861	1.285	30.929
Gebog	1.249	20.426	1.252	20.503
Dawe	1.412	6.399	1.413	6.406
Jumlah	12.938	250.039	12.957	250.517

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus Tahun 2016

Pada tabel 1.1 tersebut, perkembangan jumlah perusahaan pun akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja pula. Berdasarkan data BPS, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah perusahaan mengalami kenaikan sebesar 2,26% dan untuk jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan sebesar 0,26%. Penyerapan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kudus sendiri terbagi menjadi beberapa industri, seperti pada industri makanan/minuman, industri pakaian, industri tembakau/rokok, industri kertas dan industri mesin.

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, Kudus Dalam Angka Tahun 2016

Kabupaten Kudus yang memiliki perusahaan industri tembakau yang mendominasi, menjadikan Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang cukup besar di Jawa Tengah. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang bernilai cukup besar bagi penerimaan daerah di Indonesia. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Dana Perimbangan yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.² Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.³

Alokasi DBHCHT yang diterima oleh Kabupaten Kudus pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 140.751.411.000,00. Ketentuan besarnya angka dana DBHCHT ini diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

² Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 Tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

³ Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 1.2 Perolehan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Rokok Kabupaten Kudus Tahun 2008 – 2017

No	Tahun	Jumlah (Rp)
1.	2008	17.207.191.978
2.	2009	85.700.003.847
3.	2010	53.262.539.633
4.	2011	57.533.803.290
5.	2012	43.120.461.241
6.	2013	90.225.106.039
7.	2014	104.514.311.801
8.	2015	118.210.962.000
9.	2016	140.751.411.000
10.	2017	153.434.908.000

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Kudus Tahun 2016 (Diolah)

Tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa penerimaan DBHCHT Kabupaten Kudus meningkat setiap tahunnya dan merupakan penerima DBHCHT tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu fungsi dari penerimaan DBHCHT yang diterima adalah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama adalah untuk kepentingan kesejahteraan buruh pabrik rokok yang ada di lingkungan industri hasil tembakau (IHT). Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para buruh adalah dengan mengikutsertakan mereka dalam berbagai kegiatan yang memanfaatkan dana cukai.

Pada penelitian terdahulu, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Kudus dilaksanakan melalui program Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau (LIK–IHT). Penelitian yang dilakukan oleh Ria Anggraeni pada tahun 2016 ini meneliti tentang proses pelaksanaan program LIK–IHT di Kabupaten Kudus mulai tahun 2009 hingga tahun 2015. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa program LIK–IHT merupakan

salah satu program Pemerintah Kabupaten Kudus yang bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada industri rokok golongan kecil dalam mempertahankan eksistensinya. Program tersebut dilaksanakan melalui alokasi DBHCHT Kabupaten Kudus dalam bentuk fasilitas gedung tempat produksi, gedung laboratorium, gedung pertemuan dan fasilitas lainnya. Bangunan LIK-IHT ini berada di Desa Megawon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil yang mengalami kendala produksi.

Penggunaan DBHCHT tidak hanya digunakan untuk memberikan fasilitas kepada industri rokok golongan kecil, tetapi ditujukan pula untuk masyarakat di lingkungan hasil tembakau sebagai peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Selain masyarakat Kudus secara umum, DBHCHT diperuntukkan juga untuk buruh rokok yang aktif maupun buruh rokok yang terkena PHK. Buruh rokok yang berada di lingkungan industri hasil tembakau ini perlu diperhatikan bagi pemerintah daerah.

Secara umum, para buruh rokok terjebak dalam pola hidup yang subsisten. Dari pihak buruh, upah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/66/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, UMK (Upah Minimum Kabupaten) Kudus adalah sebesar Rp 1.608.200,00. Jumlah UMK ini naik 14,2% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.380.000,00. Meskipun begitu, peran dari pemerintah daerah maupun perusahaan diperlukan untuk kesejahteraan tenaga kerja yang berada di Kabupaten Kudus.

Industri rokok di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun jumlahnya menurun. Pada tahun 2008 jumlahnya mencapai 562 pabrik rokok, tahun 2010 menjadi 209 pabrik rokok, sedangkan pada tahun 2011 berkurang menjadi 91 pabrik rokok. Kemudian pada tahun 2013 jumlahnya menjadi 71 pabrik rokok, dan hingga akhir tahun 2016 diperkirakan hanya ada 69 pabrik rokok yang masih aktif beroperasi. Berikut data industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Kudus.

Tabel 1.3 Data Industri Agro (Khusus Industri Hasil Tembakau) – (Industri Besar, Kecil & Menengah) Kabupaten Kudus Tahun 2015

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
INDUSTRI BESAR			
1.	Djarum, PT	Jl. Jend. A Yani No. 28 Kudus	62.065
2.	Intertobacco Utama Industry, PT	Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kab. Kudus	513
3.	Nojorono Tobacco International, PT	Jl. Jend. Sudirman 86 B Kudus	7.859
INDUSTRI MENENGAH			
4.	Aroma Tobacco International, PT	Desa Bacin Kec. Bae Kab. Kudus	1.173
5.	Barito, PR	Desa Gondosari RT 01 RW 05	160
6.	Buah Cengkeh, PR	Jl. Sunan Muria 22 Kudus	10
7.	Cemara Tunggal, PR	Desa Demaan 01/04	16
8.	Chandra Asri Mulia, PR	Jl. Raya Kudus Pati Km. 15 Desa Gondoharum Kec. Jekulo	146
9.	Empat Lima, PR	Desa Gondosari 02/05	348
10.	Filasta Indonesia, PT	Desa Kaliwungu Kec. Kaliwungu	220

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Gemah Ripah, CV	Dk. Karang Sambung Ds. Bae RT 01/04 No. 89 Kec. Bae Kudus	30
12.	Jaleca, PR	Ds. Kramat RT 08 RW 03	149
13.	Jamrud Khatulistiwa Tobacco, PT	Ngembalrejo RT 01 RW 03 Kec. Bae Kudus	105
14.	Janur Kuning, PR	Ds. Piji RT 02 RW 04 Kec. Dawe	25
15.	Klampok & GOR, PR	Ds. Prambatan Kidul 07/02	198
16.	Leni Jaya, PR	Ds. Gribig RT 01 RW 07	545
17.	Moeria Mulia, PT	Jl. Tanjungkarang No. 11 Ds. Jati Kulon 04/03	126
18.	Mulyoraharjo, CV	Jl. Sunan Muria Gg. Mangga No. 32 B Desa Barongan 03/01	453
19.	Nikki Super Tobacco Indonesia, PT	Jl. KH. Wahid Hasyim No. 124 Kudus	557
20.	Nikorama Citra Tobacco, PT	Desa Panjang Kec. Bae Kudus	2.755
21.	Notodjojo Mulyo, PT	Jl. Kutilang 57 Kel. Wergu Kulon	181
22.	Nyusul Express, PR	Jl. Raya Kudus – Colo Ds. Panjang RT 03 RW 01	129
23.	Prima Tobacco Harum Industri, PT	Jl. Kudus Jepara Ds. Jetak Kembang RT 01/01 Kec. Kaliwungu Kudus	160
24.	Sansugi, PR	Jl. Lingkar Utara Ds. Bacin RT 04/03 Kec. Bae Kudus	8
25.	Sidodadi, Fa	Jl. Lukmonohadi 58 Kudus	179
26.	Sif Tobacco, PT	Prambatan Kidul RT 03/03 Kec. Kaliwungu Kudus	40
27.	Sukun, PR	Ds. Gondosari Kec. Gebog	3.854
28.	Transentra Tobacco, PT	Ds. Sidorekso Kec. Kaliwungu Kudus	170
29.	Victory Supra Sigaret, PT	Ds. Gribig Kec. Gebog	840

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
30.	Wikatama Indah Sigaret Indonesia, PT	Ds. Tanjungkarang Kec. Jati Kudus	397
31.	Martindo Inti TOB. Industry, PT	Mijen No. 185 RT 04/06 Kec. Kaliwungu Kudus	616
32.	Harapan Bangun Wahana, PT	Jl. Yos Sudarso No. – Blok 002 RT 01/04 Desa Burikan Kec. Kota Kab. Kudus	62
33.	Bangkit Cipta Industri, PT	Desa Ngembalrejo RT 01/03 Blok 001 No 13 Kec. Bae Kab. Kudus	57
34.	Dharma Anugerah Nusantara, PT	Desa Karangmalang RT 01/07 No 1463 Kec. Gebog Kab. Kudus	60
35.	Mekar Lintas Industri, PT	Jl. Dr. Lukmonohadi No 27 Kelurahan Panjunan RT 08/02 Kec. Kota Kudus	40
36.	Bangkit Harapan, PT Sentosa	Desa Tanjungkarang RT 02/05 No 96 Kec. Jati	50
INDUSTRI KECIL			
37.	Akbar Febri, PR	LIK IHT Gedung F Desa Megawon Kec. Jati	18
38.	Al Fayid, PR	LIK IHT Gedung I Desa Megawon Kec. Jati	10
39.	Armando Interobacco Industry, PT	Desa Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu, Kab. Kudus	1.427
40.	Ben Jaya, PR	Jl. Lingkar Selatan RT 06/01 Desa Jati Wetan Kec. Jati	10
41.	Djati Muria Perkasa, PT	Desa Terban RT 01/07 Kec. Jekulo Kudus	7
42.	Djuwed, PR	Ds. Prambatan Kidul 6/1 Kec. Kaliwungu	71
43.	Gambang Sutra, PR	Dersalam No. 422 RT 01/03 Kec. Bae Kudus	15
44.	Gentong Gotri, PT	Jl. Pemuda No. 75 Kudus	1.206

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
45.	Ghofur Putra Jaya, PR	LIK IHT Gedung G Desa Megawon Kec. Jati	15
46.	Hendra Jaya, PR	LIK IHT Gedung A Desa Megawon Kec. Jati	62
47.	Kembang Arum, PR	Ds. Mijen RT 09/06 No. 09 Kec. Kaliwungu Kudus	15
48.	Laut Berlin, PR	Ds. Cendono RT 01 RW 02	15
49.	M. H. Barokah Jaya, PR	LIK IHT Gedung C Desa Megawon Kec. Jati	12
50.	Mahesa Digdaya Adiguna, PR	Ds. Hongosoco RT 04/03 No. 12 Kec. Jekulo	20
51.	Maju Abadi Sigaret, PT	Desa Sidorekso, Kec. Kaliwungu, Kudus	116
52.	Menoro Guru Putro, PR	Mejobo RT 03/01 Kec. Mejobo Kudus	5
53.	Parade Bintang, PR	Ds. Garung Lor, Kaliwungu, Kudus	63
54.	Payung Mas, PR	Prambatan Kidul RT 07/02 No. 25 Kec. Kaliwungu	15
55.	Pendopo Istana, PR	Desa Cendono 2/1	109
56.	Rajan Nabadi, PR	LIK IHT Gedung H Desa Megawon Kec. Jati	25
57.	Samirejo, PR	Ds. Samirejo RT 02/03 No. 48 Kec. Dawe	20
58.	Sekar Pendawi Makmur, PR	LIK IHT Gedung D Desa Megawon Kec. Jati	20
59.	Sinar Adib Putra, PR	Ds. Lau RT 06/01 Kec. Dawe Kudus	15
60.	Sinta, PR	Ds. Tumpang Krasak RT 04 RW 06 Kec. Jati	50
61.	Stevania Ultra Tobacco, PT	Jl. Raya Kudus-Jepara, Desa Mijen Kec. Kaliwungu	310
62.	Sumber Urip Mulya, PR	Ds. Ngembalrejo RT 03/04 No. 692 Kec. Bae	7
63.	Surya Jaya, PR	Ds. Jati Kulon RT 02/03 No. 112	8

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
64.	Syihab Aji Putra, PR	Ds. Lau RT 01 RW 01 Kec. Dawe	12
65.	Wadzik Jaya, PR	Ds. Hadiwarno RT 02/02 Kec. Mejobo	13
66.	Wido, PR	Ds. Singocandi RT 03/01 No. 45 B, Kec. Kota Kudus	8
67.	Buah dan Langsep, PR	Jl. Sunan Muria No. 24 Ds. Barongan RT 03/03 Kec. Kota Kab. Kudus	14
68.	Mercu Pantura Industry, PT	Jl. Lingkar Timur RT 01/11 Blok 22 No. 001 Desa Jepang Kec. Mejobo	30
69.	Koerma, PR	Jl. Pangeran Puger No. 26 RT 03/02 Desa Demaan, Kec. Kota	25
Total Tenaga Kerja			88.064

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus tahun 2015

Pada tabel 1.3 tersebut, jumlah industri hasil tembakau yang berada di Kabupaten Kudus tahun 2015 hingga sekarang masih beroperasi sejumlah 69 perusahaan. Terdiri dari 3 perusahaan industri hasil tembakau golongan besar, 33 perusahaan industri hasil tembakau golongan menengah dan 33 perusahaan industri hasil tembakau golongan kecil yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Kudus. Penurunan jumlah perusahaan industri hasil tembakau dari tahun 2008 pun menyebabkan pula penurunan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri tembakau tersebut. Akibatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pun terjadi seiring menurunnya jumlah industri hasil tembakau ini yang mengakibatkan buruh rokok menjadi pengangguran.

Pemerintah Kabupaten Kudus pun ikut mengelola DBHCHT sebagai program nasional yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Pada SOTK (Satuan Organisasi dan Tata Kerja) baru yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Kudus menggabungkan tugas dan wewenang pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki program dan kegiatan untuk mengembangkan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (IHT). Program kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari program nasional sebagai bentuk meningkatkan keterampilan kerja di masyarakat industri hasil tembakau. Anggaran DBHCHT yang diterima Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus tahun anggaran 2017 sebesar Rp 20.250.000.000,00. Berikut rincian penggunaannya:

Tabel 1.4 Penggunaan DBHCHT Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017

No	Nama Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
	Program Penciptaan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Rp 1.750.000.000,00
1.	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri berbasis teknologi	Rp 1.750.000.000,00
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 12.500.000.000,00
2.	Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT	Rp 9.000.000.000,00
3.	Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau melalui pengadaan peralatan keterampilan	Rp 1.000.000.000,00

No	Nama Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
4.	Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau melalui sarana prasarana BLK	Rp 750.000.000,00
5.	Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau melalui rehabilitasi sedang/berat sarpras BLK	Rp 1.750.000.000,00
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp 1.000.000.000,00
6.	Pembinaan kemampuan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT	Rp 1.000.000.000,00
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 1.250.000.000,00
7.	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan wirausaha dan padat karya	Rp 1.250.000.000,00
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 1.000.000.000,00
8.	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha mikro dan menengah	Rp 1.000.000.000,00
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp 400.000.000,00
9.	Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian	Rp 400.000.000,00
	Program Penataan Struktur Industri	Rp 2.350.000.000,00
10.	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam	Rp 2.350.000.000,00

No	Nama Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
	rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan keterampilan industri hulu hilir	
TOTAL		Rp 20.250.000.000,00

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus
Tahun 2017 (Diolah)*

Salah satu fungsi dari adanya penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kepentingan kesejahteraan buruh pabrik rokok yang ada di lingkungan industri hasil tembakau (IHT). Pembagian dari penerimaan DBHCHT ini juga dibagi merata pada seluruh satuan tugas pemerintah daerah Kabupaten Kudus hingga tingkat kecamatan. Peran Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ini salah satunya adalah mengadakan program pelatihan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau. Maka dengan adanya DBHCHT ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada buruh rokok yang menjadi pengangguran akibat adanya PHK maupun buruh rokok yang masih aktif dengan melaksanakan kegiatan pelatihan sebagai wujud pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat lingkungan industri tembakau.

Gambar 1.1 Pamflet Program Pelatihan

DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUDUS

Tahun 2017 Menyelenggarakan kegiatan :

Pelatihan BLK

1. Mengajar Bahasa Dasar
2. Mengajar Bahasa Lanjutan
3. Mengajar Tias
4. Mengajar Taps
5. Tata Keseluruhan Rambut Dasar
6. Tata Keseluruhan Rambut Lanjutan
7. Tata Rias Mawani Dasar
8. Tata Rias Mawani Lanjutan
9. Tata Keseluruhan Kultur
10. Tata Baga
11. Operator Komputer Dasar
12. Operator Komputer Lanjutan
13. Desain Grafis Dasar
14. Desain Grafis Lanjutan
15. Web Desain
16. Komputer Akutansi Perkantoran
17. Las SMAW
18. Pertukangan Kayu
19. Desain Gambar Teknik 2D & 3D
20. Otomotif Motor Dasar
21. Otomotif Motor Lanjutan
22. Otomotif Mobil Lanjutan
23. Otomotif Mobil Spesialis AC
24. Otomotif Mobil Spesialis Auto & Aesoris
25. Listrik dan Pendingin
26. SII- Mobil
27. Teknisi Komputer
28. Teknisi HP
29. Batik
30. Baki Lamanan
31. Bahasa Korea
32. Bahasa Inggris

Bidang Perindustrian

Pelatihan :

1. Kerajinan Ragan
2. Produk Meja
3. Jasa Perbaikan Mesin
4. Aplikasi Berbasis Komputer
5. Aplikasi Smartphone
6. Desain Web
7. Desain Grafis dan Advertising
8. Desain dan Produksi Kaca
9. Desain dan Produksi Benda
10. Desain dan Produksi Batu
11. Desain dan Produksi Sepatu dan Aksoris
12. Produksi dan Pemasaran Kue Biskuit
13. Produksi dan Pemasaran Kue Kering
14. Produksi dan Pemasaran Biskuit dan Coklat
15. Produksi dan Pemasaran Olahan Ikan dan Susu
16. Desain dan Teknologi Pengembangan Makanan
17. Pemasaran Produk Fashion
18. Desain dan Produksi Kerajinan Kayu dan Bambu
19. Desain dan Produksi Kerajinan Kayu dan Bambu

Magang :

1. Batik
2. Tias
3. Bordir
4. Makanan

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelatihan Kewirausahaan Tata Boga

1. Pelatihan Usaha Produksi Kue Basah
2. Pelatihan Usaha Produksi Kue Kering
3. Pelatihan Usaha Produksi Puding
4. Pelatihan Usaha Produksi Aneka Minuman
5. Pelatihan Usaha Produksi Olahan Bahan Singskong
6. Pelatihan Usaha Produksi Aneka Bakery
7. Pelatihan Usaha Produksi Aneka Cake
8. Pelatihan Usaha Produksi Olahan Ikan

Pelatihan Kewirausahaan Konveksi dan Keterampilan Jahit

1. Pelatihan Pembuatan Busana Muslim
2. Pelatihan Pembuatan Pakaian wanita

INFO LENGKAP :
BALAI LATIHAN KERJA
 DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUDUS
 Jalan Giripah Ngembalirig No. 19 Kudus
 Telp. (0291) 438801, 431470; Fax (0291) 438801 Kudus 59322

Sumber: Dok. Pribadi

Program pelatihan yang dilaksanakan ini membuka pendaftaran peserta dengan cara memasang pamflet hingga memberikan informasi melalui media *blog* atau *website* resmi dari Dinas. Calon peserta pelatihan hanya membawa berkas persyaratan yang telah ditentukan dan memilih sendiri program pelatihan yang akan di ikuti. Calon peserta pelatihan paling banyak merupakan ibu-ibu rumah tangga maupun masyarakat yang masuk dalam golongan angkatan kerja. Beberapa dari mereka yang mengikuti program pelatihan tidak menjelaskan secara rinci pekerjaannya. Misal ibu-ibu hanya mengisi pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, namun tidak sedikit pula dari mereka yang merupakan buruh rokok yang berada di

lingkungan industri hasil tembakau (IHT). Hasil dari program pelatihan ini dinyatakan berhasil, seperti yang dikatakan oleh salah satu peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan AMT pada akhir Februari 2017 berikut:

“Pelatihan yang dilaksanakan tidak cukup hanya lima hari saja, rasanya ingin terus mengikuti pelatihan ini. Dari pelatihan ini saya punya motivasi lagi untuk melakukan yang lebih dari sekedar ibu rumah tangga.”⁴

Buruh rokok yang kebanyakan adalah perempuan atau lebih tepatnya ibu-ibu. Pekerjaan menjadi buruh rokok biasanya dilakukan mulai pagi hari hingga siang hari, sehingga lebih mudah bagi para ibu-ibu untuk membagi waktu dan mengurus rumah tangganya. Adanya pengurangan pegawai yang terjadi seiring menurunnya jumlah industri hasil tembakau ini yang mengakibatkan buruh rokok menjadi pengangguran.

Melalui DBHCHT, Dinas terkait mengadakan program pelatihan untuk masyarakat di lingkungan IHT agar memiliki keterampilan kerja lain. Pelaksanaan program pelatihan ini perlu diketahui kinerjanya. Sudahkah pemerintah daerah melaksanakan program pelatihan ini sesuai dengan tujuan dan pedoman pengelolaan DBHCHT yang ditetapkan pada peraturan bupati maupun peraturan gubernur. Analisis terhadap pelaksanaan program pelatihan sangat diperlukan sebagai pandangan secara umum proses pelaksanaan yang dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM di Kabupaten Kudus.

Penelitian ini akan menganalisis dari implementasi program pelatihan bagi eks-buruh rokok sesuai dengan anggaran dari DBHCHT yang telah dianggarkan. Pelaksanaan program pelatihan yang dikhususkan bagi masyarakat di

⁴ Hasil diskusi dengan responden peserta pelatihan pada 24 Februari 2017

lingkungan industri hasil tembakau (IHT) sebagai bentuk pemberdayaan dari penggunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis perlu untuk meneliti dan menganalisis pelaksanaan dari program pelatihan yang dilaksanakan menggunakan DBHCHT dalam bidang ketenagakerjaan dan perindustrian, skripsi yang diajukan ini berjudul *“Implementasi Program Pelatihan Ex-Buruh Rokok dari Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang perlu diteliti yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan dari program pelatihan bagi eks-buruh rokok yang dijalankan melalui penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Kudus?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari program pelatihan yang dijalankan di lingkungan industri hasil tembakau dari penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus.
2. Untuk menemukan dan menganalisis hasil pelaksanaan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk analisa pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program pelatihan yang baik dari penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yang salah satu fungsinya untuk pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja eks-buruh rokok maupun masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (IHT) dengan adanya program pelatihan. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi pelaksanaan program pelatihan selanjutnya maupun bagi penelitian lain nantinya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus untuk menjalankan proses pelaksanaan program pelatihan dalam mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) serta dapat menjalankan urusan pemerintahan di lingkungan industri hasil tembakau (IHT).

1.5. Kerangka Pemikiran Teori

1.5.1 Program Pelatihan sebagai Kebijakan Publik

Program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Program pelatihan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak tertentu, termasuk pemerintahan. Pemerintah memiliki

kewenangan dalam mengurus daerahnya, dalam kewenangan tersebut muncul kebijakan yang harus dilaksanakan untuk masyarakat.

Program pelatihan merupakan pemberian pelatihan dengan metode yang tepat dan memiliki alasan serta tujuan yang jelas mengapa pelatihan tersebut perlu dilakukan. Program-program yang direncanakan akan membantu memenuhi kebutuhan perorangan dalam mencari pekerjaan. Pelatihan berdampak luas terhadap pengelolaan sumber daya manusia karena adanya pengelolaan SDM yang baik akan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik karyawan maupun bagi perusahaan. Pelatihan bertujuan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan (Simamora, 2006: 276).

Pelatihan pada prinsipnya merupakan upaya membekali seseorang dengan pengetahuan dan keterampilan serta *attitude* sehingga seseorang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas atau aktivitas keorganisasian sehari-hari.⁵ Mangkunegara (2001: 37) mendefinisikan pelatihan dan pengembangan merupakan usaha-usaha berencana yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan *skill*, pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi. Pelatihan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok agar dapat memberikan sumbangan kepada efektivitas dan efisiensi organisasi. Namun ada batasan yang ditarik antara pelatihan dengan pengembangan, dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupan serta memfokuskan pada

⁵ Boe, Ismenia. (2014). Pengaruh Program Pelatihan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kepresidenan Republik Timor Leste. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 3.10 : 559-580. ISSN: 2337-3067

individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang.

Menurut Irianto (Simamora, 2006: 276) menyatakan bahwa secara konseptual program pelatihan melingkup tiga tahapan, yaitu:

- 1) Analisa kebutuhan pelatihan;
- 2) Implementasi program pelatihan;
- 3) Evaluasi program pelatihan.

Program pelatihan dalam penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah dari adanya penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai bentuk program di lingkungan industri hasil tembakau. Melalui anggaran yang ada, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan program pelatihan. Program pelatihan dilakukan dalam rangka kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh aktor politik atau aktor untuk mencapai tujuan tertentu disertai dengan cara dan tahapan-tahapan untuk mencapainya yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat (Desy, 2016: 11). Kebijakan publik ada dua macam, yaitu kebijakan publik yang bersifat normatif dan kebijakan publik yang bersifat operasional. Kebijakan publik yang bersifat normatif berfungsi sebagai landasan yuridis formal. Untuk mengimplementasikannya, maka diperlukan kebijakan lanjutan yang bersifat operasional. Misalnya adalah agar pasal-pasal dalam UUD dapat diimplementasikan, maka perlu dibuatkan Undang-Undang (UU). Selanjutnya, kebijakan publik yang bersifat operasional berarti kebijakan ini bersifat *directly applicable* tanpa memerlukan kebijakan lanjutan lagi, apabila akan

diimplementasikan. Misalnya, kebijakan publik berupa Surat Keputusan (SK). Program pemerintah merupakan suatu kebijakan publik yang bersifat operasional dan langsung dapat diimplementasikan (Fatih, 2010: 9-10).

Karakteristik utama dari suatu kebijakan publik adalah: *Pertama*, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. *Keempat*, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. *Kelima*, kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta (William, 2000: 64).

Menurut Michael Howlet dan M. Ramesh seperti dikutip oleh Subarsono, menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, yaitu: (a) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah; (b) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah; (c) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan; (d) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil; (e) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan (Subarsono, 2013:13-14).

1.5.2 Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik merupakan salah satu output atau hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan, disamping pelayanan pemerintah publik, barang publik, dan regulasi. Menurut Dunn (2000: 132), menyatakan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Kesalahan dapat terjadi pada pembuatan suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama. Sehingga semaksimal mungkin kesalahan tersebut harus diminimalisir atau dihilangkan jika tidak ingin mendapatkan masalah pada tahap pengimplementasian dilapangan.

Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa diimplementasikan, kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Hal lain yang penting juga dalam implementasi

kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu. Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut.

Di dalam siklus perencanaan, implementasi dan evaluasi, implementasi adalah fase pelaksanaan. Sumber daya manusia dan keuangan harus dialokasikan dengan baik, struktur organisasional dan sistem harus bekerja sesuai dengan fungsinya dan kebijakan internal dan prosedur harus dikembangkan (Robert, 1999: 260). Pada tahap implementasi kebijakan, kebijakan/program yang sudah disahkan harus diimplementasikan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh kebijakan/program tersebut agar tujuan kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

1.5.2.1 Pengertian dan Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan dan program-program. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.

Riant Nugroho (2003: 153) menyatakan implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan

merupakan salah satu *variable* yang menentukan berhasil tidaknya pencapaian *policy goals*. Namun, seringkali suatu kebijakan tidak diimplementasikan sebagaimana yang seharusnya. Hal ini terjadi bisa disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya, adanya perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan mengenai hakikat keberadaan suatu kebijakan.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Winarno, 2007: 146). Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan (Udoji dalam Wahab, 1991: 45).

Sementara itu, menurut Ripley & Franklin ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *what's happening* (apa yang terjadi). Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standart aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk "*what's happening*" mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya (Nurharjadmo, *Spirit Publik*, 2008: Vol.4, No.2).

Pendekatan kepatuhan muncul dalam literatur administrasi publik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu bawahan terhadap agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisis karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut Ripley, paling tidak

terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni: (1) banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan (2) adanya program yang tidak didesain dengan baik. Perspektif kedua adalah perspektif faktual yang berasumsi bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian.

Implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak/akibat bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Berdasarkan pendapat Dunn, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang (hendaknya) dirancang bersamaan dengan perancangan kebijakan publik yang bersangkutan. Tidak semua kebijakan berhasil dilaksanakan secara sempurna karena implementasi kebijakan pada umumnya lebih sukar daripada sekedar merumuskannya.

1.5.2.2 Metode Implementasi Kebijakan

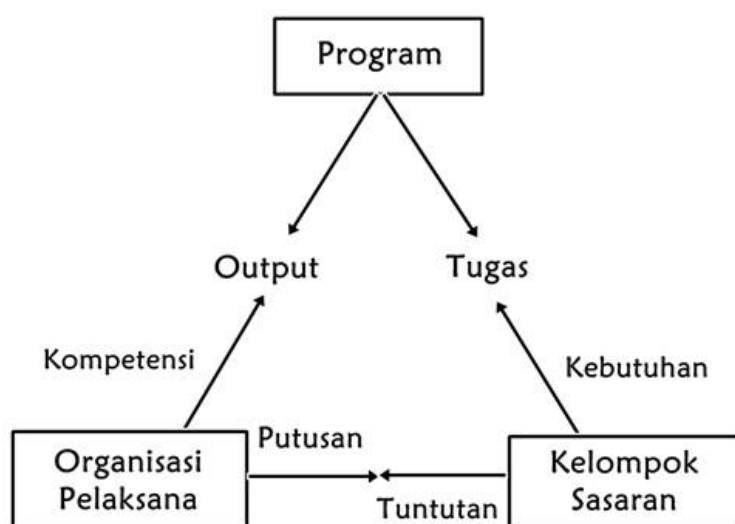
Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Implementasi kebijakan digambarkan sebagai tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun pihak swasta.

Implementasi kebijakan dikategorikan menjadi dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Nugroho (2003: 158) merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan lebih banyak yang terlibat baik tenaga kerja maupun kemampuan organisasi. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi/kecenderungan implementor, dan struktur birokrasi mempengaruhi derajat keberhasilan implementasi kebijakan. Masing-masing faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lainnya, yang pada akhirnya mempengaruhi implementasi kebijakan.

Korten (dalam Tarigan, 2000:19) membuat Model Kesesuaian implementasi kebijakan dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.

Gambar 1.2 Model Kesesuaian Menurut Korten



Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas *outputnya* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan yang diperkenal oleh Korten memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Hal ini dapat dipahami dari kata kunci kesesuaian yang digunakan. Meskipun demikian, elemen yang disesuaikan satu salama lain –program, pemanfaat dan organisasi– juga sudah termasuk baik dalam dimensi isi (program) dan dimensi konteks implementasi (organisasi) maupun dalam *outcomes* (pemanfaat) pada model proses politik dan administrasi dari Grindle.

1.5.2.3 Cakupan Implementasi Kebijakan

Rencana adalah 20 persen keberhasilan, implementasi adalah 60 persen sisanya, 20 persen sisanya adalah bagaimana mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah yang paling berat, karena disini masalah-masalah kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman

utama adalah konsistensi implementasi (Nugroho, 2006: 119). Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap inilah dapat dilihat kesesuaian berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program.

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edward III. Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni:

- (i) Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan?
- (ii) Faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang

dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada *standart operating proesedure* yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

1.5.2.4 Signifikansi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono, 2010: 87).

Terkait dengan konsep dan pengertian implementasi kebijakan, menurut Linebery, mengatakan bahwa proses implementasi setidaknya-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana;
- b. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (*standart operating proesedures/SOP*);
- c. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas dan badan pelaksana;
- d. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan elemn-elemen di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlu adanya koordinasi yang kuat di dalam suatu organisasi baik dalam pembagian tugas maupun pemenuhan sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan yang tentunya

harus disesuaikan dan dimuat dalam SOP (*Standart Operating Prosedures*) yang telah disepakati.

Struktur organisasi birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

1.5.2.5 Analisis Implementasi Kebijakan

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya adalah berusaha menggambarkan, menganalisis dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan *stakeholder* lain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dipelajari sebagai proses pembuatan kebijakan, tetapi juga dinamika yang terjadi ketika kebijakan tersebut dibuat dan diimplementasikan.

Tujuan dari implementasi kebijakan publik adalah berupaya mengungkapkan faktor-faktor yang mendukung atau menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan kebijakan yang telah diambil. Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi.

Alasan lain yang mendasari perlunya implementasi kebijakan dapat dipahami dari pernyataan Grindle dan Quade yang mengharapkan agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segitiga variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan kebijakan. Manfaat dalam melakukan implementasi kebijakan adalah mengetahui proses pelaksanaan yang dilakukan oleh implementor dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Program Pelatihan Eks-Buruh Rokok

Program pelatihan merupakan pemberian pelatihan dengan metode yang tepat dan memiliki alasan serta tujuan yang jelas mengapa pelatihan tersebut perlu dilakukan. Program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus adalah Pelatihan BLK (Balai Latihan Kerja) terdapat 32 program pelatihan, Pelatihan Bidang Perindustrian ada 19 macam program pelatihan dan Pelatihan Bidang

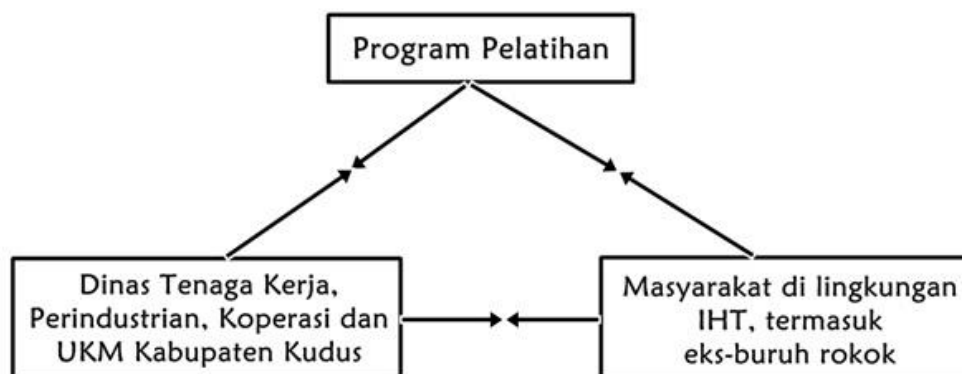
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ada 9 macam program pelatihan. Pelaksanaan program tersebut dikhususkan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (IHT) termasuk eks-buruh rokok wanita sebagai bentuk pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja dari penggunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus.

1.6.2 Analisis Implementasi Program Pelatihan

Pada tahap implementasi kebijakan, kebijakan atau program yang sudah disahkan harus diimplementasikan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh kebijakan/program tersebut agar tujuan kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak/akibat bagi masyarakat. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan lebih banyak yang terlibat baik tenaga kerja maupun kemampuan organisasi. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi/kecenderungan implementor, dan struktur birokrasi mempengaruhi derajat keberhasilan implementasi kebijakan.

Operasionalisasi konsep yang digunakan dalam analisis implementasi program pelatihan ini mengacu pada Model Kesesuaian implementasi kebijakan menurut Korten. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksana program dan kelompok sasaran program. Berikut operasionalisasi konsep pada implementasi program pelatihan yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus ini.

Gambar 1.3 Operasionalisasi Konsep Analisis Implementasi Program Pelatihan menurut Model Kesesuaian Korten



Pada penelitian ini analisis implementasi yang dilakukan melihat tiga unsur implementasi program dalam model kesesuaian menurut Korten. Berikut penjelasan analisis implementasi program pelatihan:

- 1) Kesesuaian antara program pelatihan dengan masyarakat di lingkungan IHT, yaitu menganalisis apakah program yang ditawarkan oleh SKPD terkait sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan IHT, termasuk eks-buruh rokok yang mengalami PHK dari penurunan jumlah industri tembakau yang terjadi di Kabupaten Kudus.
- 2) Kesesuaian antara program pelatihan dengan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM, yaitu menganalisis apakah tujuan diselenggarakan program pelatihan tersebut telah dilakukan dengan baik sesuai dengan kemampuan SKPD terkait sebagai implementor.
- 3) Kesesuaian antara masyarakat di lingkungan IHT dengan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM, yaitu menganalisis apakah *output* program pelatihan dapat dilakukan oleh masyarakat di lingkungan IHT.

Melalui pola model kesesuaian tersebut, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja program pelatihan tidak akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan riset naratif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang mengalir dari asumsi filosofis, menuju lensa penafsiran, kemudian menuju prosedur yang dilibatkan dalam mempelajari isu-isu sosial atau manusia (Creswell, 2015: 59). Penelitian kualitatif digunakan karena adanya suatu permasalahan atau isu yang perlu dieksplorasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moeleong, 2007: 6).

Czarniawska dalam Creswell (2015: 96) mendefinisikan riset naratif sebagai tipe desain kualitatif yang spesifik yang “narasinya dipahami sebagai teks yang dituturkan atau dituliskan dengan menceritakan tentang peristiwa/aksi atau rangkaian peristiwa/aksi, yang terhubung secara kronologis”. Dalam riset naratif, peneliti harus mengumpulkan banyak informasi tentang partisipan, dan harus memiliki pemahaman yang baik tentang konteks dari kehidupan partisipan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menghasilkan gambaran tentang fase pelaksanaan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya yang berhubungan dengan pelaksanaan program pelatihan eks-buruh rokok dan masyarakat di lingkungan IHT di Kabupaten Kudus untuk menghasilkan gambaran implementasi program tersebut.

1.7.2 Situs Penelitian

Pada penelitian ini dipilih Kabupaten Kudus sebagai situs penelitian dikarenakan Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau terbesar di provinsi Jawa Tengah. Adanya DBHCHT tersebut dapat diketahui penggunaannya melalui program yang dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya ex-buruh rokok dan masyarakat di lingkungan IHT. Penelitian ini dilakukan pada instansi terkait di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus serta *stakeholder* lainnya.

1.7.3 Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. *Key Informant*, yaitu:

1. Drs. Agus Sulistiyono (Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus);
2. Anggun Nugroho, ST (Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus);
3. Moh. Syamsu Naryadi, S. Kom (Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus);

4. Drs. Abi Wibowo (Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus).

b. Informan Triangulasi, yaitu:

1. Nurul Rizka Arumsari, SE., MM (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus).

Teknik pengambilan informan untuk wawancara pada penelitian ini menggunakan sistem *purposive sampling* atau pengambilan informan dengan sengaja untuk memperoleh *key informant* dan informan triangulasi. *Key informant* dipilih dengan sengaja kepada informan yang mengetahui dan ikut andil dalam pelaksanaan program pelatihan. Sedangkan pengambilan informan triangulasi pada dosen dikarenakan sebagai pengamat dibidang pendidikan, dipilihnya dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus adalah berhubungan mengenai penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus sendiri. Sehingga diharapkan informan triangulasi ini mengetahui pengelolaan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.

1.7.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data kualitatif dengan riset naratif. Pendekatan riset naratif menggunakan proses wawancara dan dokumen sebagai bentuk utama pengumpulan datanya. Penelitian ini dapat merekam wawancara, mengamati individu, dan mencatat dalam bentuk catatan lapangan. Jenis data yang dapat dikumpulkan pada penelitian ini berupa dokumen dan arsip, wawancara terbuka, subjek jurnal, dan pengamatan partisipan.

1.7.5 Sumber Data

1.7.5.1 Data Primer

Merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari informan melalui hasil wawancara dan hasil pengamatan di lapangan. Dalam melakukan *input* data primer, peneliti terlebih dahulu akan membuat identifikasi terhadap sumber pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan informan yang terlibat langsung, yaitu pelaksana program pelatihan yaitu Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus. Serta menggunakan informan triangulasi yakni Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.

1.7.5.2 Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian melalui dokumen-dokumen. Sumber data ini bersifat menunjang dan melengkapi sumber data primer. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa buku, artikel, jurnal, laporan, internet, serta catatan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, pengamatan dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Dokumen atau arsip diperoleh dari lembaga atau instansi terkait yang melaksanakan program kegiatan dengan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Kudus. Teknik pengambilan informan dalam wawancara menggunakan sistem *purposive sampling*

(pengambilan dengan sengaja) untuk memperoleh *key informant*. Berikut penjelasan teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif, yaitu:

1. Wawancara

Kvale dan Brinkmann (2009) dalam Creswell memaparkan serangkaian tujuh tahapan wawancara mulai dari tematisasi penelitian, desain studi, wawancara, menulis atau merekam wawancara, kemudian analisis data, verifikasi validitas, reliabilitas dan generalisabilitas dari temuan, dan terakhir pelaporan studi (2015: 227). Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara terarah, yaitu bahwa bahan wawancara telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya pengembangan pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan subjek penelitian terkait, baik dengan staf dinas, eks-buruh rokok dan dosen fakultas ekonomi sebagai informan triangulasi dalam program pelatihan.

2. Pengamatan

Pengamatan adalah salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan riset dan pertanyaan riset. Sebagai pengamat kualitatif, peneliti diharuskan dapat mengubah peran selama proses pengamatan, misalnya memulai sebagai seorang non partisipan dan kemudian beralih menjadi partisipan atau sebaliknya (Creswell, 2015: 231-232). Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan pada pelaksanaan program kegiatan pelatihan dari penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

3. Dokumentasi

Bentuk pengumpulan data ini berupa mengumpulkan data berupa catatan lapangan, transkrip, bahan audiovisual atau rekaman, beberapa arsip terkait dan lain sebagainya. Peneliti melakukan catatan lapangan pada partisipan sebagai proses pengumpulan data. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah catatan tertulis, dokumen dan arsip yang menyangkut masalah yang diteliti.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data untuk analisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan (Creswell, 2015: 251). Untuk menganalisis data kualitatif, peneliti bergerak dalam lingkaran analisis daripada menggunakan pendekatan linier yang tetap. Data yang dikumpulkan dalam studi naratif perlu dianalisis untuk cerita yang hendak mereka tuturkan, kronologi dari peristiwa yang tidak terungkap, dan titik-titik balik atau *epiphanies* (Creswell, 2015: 263). *Epiphanies* atau cerita akan muncul dari catatan individu atau dari wawancara.

Analisis data dimaksudkan untuk mengolah data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Analisis data dimulai sejak tahap perumusan masalah, sebelum melakukan penelitian di lapangan dan berakhir saat penulisan hasil penelitian. Adapun alur kegiatan dalam analisis data ini adalah (Creswell, 2015):

1. Reduksi data, yaitu diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Melalui kegiatan ini

maka peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.

2. Penyajian data, yaitu setelah data tersebut direduksi lalu data tersebut disusun ke dalam satuan-satuan, dikategorikan, kemudian disajikan.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah terakhir dalam analisa data kualitatif, penarikan kesimpulan ini tergantung kepada besarnya kumpulan catatan mengenai data tersebut. Data-data hasil wawancara akan dideskripsikan sesuai pedoman wawancara dan berfungsi sebagai pelengkap atau penguat argumentasi dari pihak-pihak yang diwawancarai.

Penelitian ini juga menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moelong, 2007: 330). Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Pada penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi yang memanfaatkan penggunaan sumber, triangulasi teknik dan triangulasi teori. Hal ini karena penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan studi pustaka, dalam memperoleh data.

Langkah terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan sesuai dengan catatan-catatan atau hasil yang diperoleh dari lapangan. Analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Pendekatan kualitatif mengungkapkan fenomena sosial yang nyata dan unik sehingga data yang diperoleh tidak harus berupa angka, akan tetapi lebih banyak mendeskripsikan.